



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

20 26



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026** pada Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai organisasi, serta memuat informasi terkait target dan capaian kinerja BPRL Makassar, khususnya pada Triwulan I Tahun 2026. Selain itu, laporan ini juga mencakup capaian tujuan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta tinjauan terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan tuntutan publik yang menghendaki agar akuntabilitas senantiasa dikedepankan oleh setiap instansi pemerintah, serta dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPRL Makassar.

Maros, 24 April 2026

**Kepala Balai Penataan Ruang Laut
Makassar**



Ditandatangani
Secara Elektronik

A Muhammad Ishak Yusma

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik Triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 BPRL Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) serta selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian kinerja BPRL Makassar Triwulan I Tahun 2026 adalah kategori **Istimewa** dengan nilai kinerja organisasi **120%**. Pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat realisasi karena anggaran BPRL Makassar masih melekat pada DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

Capaian Indikator Kinerja Manajerial pada Triwulan I Tahun 2026 adalah realisasi Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar pada triwulan I ini yaitu 100 dengan persentase capaian 123% atau 120% pada aplikasi kinerja dengan target triwulan I sebesar 81.

Di balik capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang memperoleh predikat “Istimewa”, BPRL Makassar menghadapi tantangan strategis berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 dengan wilayah kerja dari 9 (sembilan) provinsi yang mencakup Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, yang memiliki karakteristik biofisik, sosial, dan tata ruang yang beragam. Selain itu, jumlah SDM ASN sebanyak 56 (Lima puluh enam) orang, sehingga berdampak pada beban kerja dan perlunya penguatan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

BPRL Makassar hingga Triwulan I Tahun 2026 belum memiliki DIPA mandiri dan masih menginduk pada Ditjen PRL, sehingga membatasi fleksibilitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, berpotensi menyebabkan keterlambatan, kurang optimalnya capaian kinerja, serta lambatnya respons terhadap kebutuhan lapangan akibat panjangnya proses birokrasi. Ke depan, diperlukan penguatan sistem digital spasial terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis (GIS, AMDAL, drone, dan hidro-oseanografi), penambahan personel untuk pelayanan KKPRL, serta penguatan koordinasi dengan Ditjen PRL dan percepatan penyusunan DIPA mandiri guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Tugas dan Fungsi.....	1
1.4 Organisasi.....	3
1.5 Isu Strategi, Potensi dan Permasalahan	5
1.6 Sistematika Penyajian	7
II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis 2025-2029.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026	10
2.3 Keselarasan PK Eselon I dan UPT.....	12
2.4 Postur Anggaran 2026.....	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian kinerja.....	17
3.1.1 IKU 1 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)	17
3.1.2 IKU 2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%).....	18
3.1.3 IKU 3 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)	20
3.1.4 IKU 4 Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)	21
3.1.5 IKU 5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%).....	25
3.1.6 IKU 6 Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)	27
3.1.7 IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai).....	29
3.1.8 IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Makassar	30

3.1.9 IK 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Makassar (%)	32
3.1.10 IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%)	33
3.1.11 IK 11 Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar	34
3.1.12 IK 12 Indeks profesionalitas ASN BPRL Makassar (Indeks)	36
3.1.13 IK 13 Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Makassar (Nilai)	37
3.1.14 IK 14 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)	39
3.1.15 IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)	40
3.1.16 IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%)	42
3.2 Akuntabilitas Keuangan	44
IV. PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Rekomendasi	45
4.3 Tindak Lanjut	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi jenjang Pendidikan pegawai BPRL Makassar	5
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPRL Makassar Tahun 2026.....	10
Tabel 3. Postur Anggaran BPRL Makassar Tahun 2026	13
Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja BPRL Makassar Tahun 2026	14
Tabel 5. Capaian IKU 1 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan).....	17
Tabel 6. Capaian IKU 2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar	19
Tabel 7. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaat ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di BPRL Makassar (Kawasan)	20
Tabel 8. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)	23
Tabel 9. Capaian IKU 5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)	26
Tabel 10. Capaian IKU 6 Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)	28
Tabel 11. Capaian IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)	29
Tabel 12. Capaian IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPRL Makassar (Nilai)	31
Tabel 13. Capaian IK 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	32
Tabel 14. Capaian IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%)	33
Tabel 15. Capaian IK 11 Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar	35
Tabel 16. Capaian IK 12 Indek profesionalitas ASN BPRL Makassar (Indeks)	36
Tabel 17. Capaian IK 13 Nilai Keterbukaan informasi publik BPRL Makassar	38
Tabel 18. Capaian IK 14 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)	39
Tabel 19. Capaian IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)	41
Tabel 20. Capaian IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%).....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan struktur Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar	2
Gambar 2. Jumlah dan sebaran staf BPRL Makassar Tahun 2026.....	4
Gambar 3. Capaian Kinerja BPRL Makassar pada aplikasi Kinerjaku	14
Gambar 4. Konsultasi KKPRL atas nama Muhammad Syamsul Rezza Nurdin	24
Gambar 5. Konsultasi KKPRL CDK Mamminasata	24
Gambar 6. Konsultasi KKPRL PT. Marina Indo Prima.....	24
Gambar 7. Dashboard KKPRL BRPL Makassar	25

BABI

PENDAHULUAN

20 26



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan *good governance* merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam rangka itu, diperlukan sistem pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan sistematis melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023, SAKIP merupakan rangkaian proses terintegrasi yang meliputi perencanaan kinerja, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan. Sejalan dengan itu, penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 semakin memperkuat fungsi dan peran unit pelaksana teknis, termasuk BPRL Makassar, dalam mendukung penataan ruang laut yang efektif dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, yang memuat capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, guna memastikan pencapaian sasaran strategis organisasi serta mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

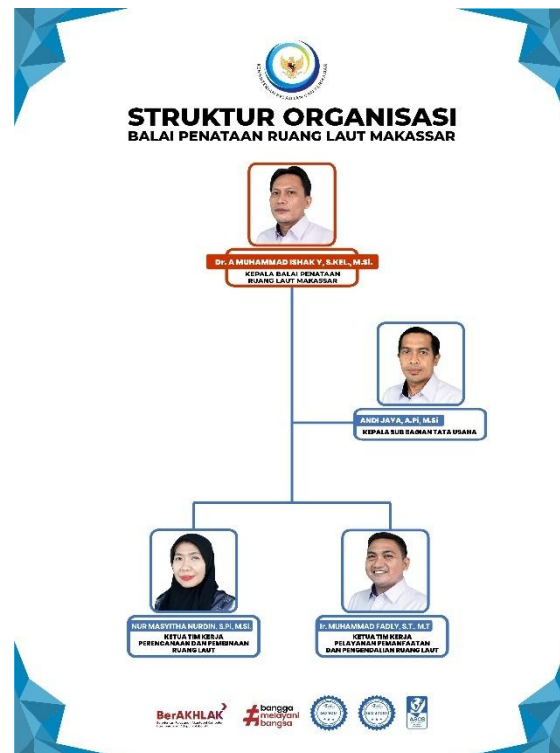
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan BPRL Makassar di Triwulan I Tahun 2026

1.3 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang berdiri Tanggal 31 Desember 2025 dan mempunyai tugas **fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 29/MEN/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. BRPL Makassar berkedudukan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah kerja meliputi 9 (sembilan) Provinsi yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Struktur organisasi antara lain Kepala Balai dan Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BPRL Makassar membentuk 2 (dua) Tim Kerja yaitu Tim Kerja Perencanaan dan Pembinaan Ruang Laut dan Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut. Di bawah ini adalah Struktur organisasi BPRL Makassar Tahun 2026.



Gambar 1. Bagan struktur Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BPRL Makassar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemodelan data tematik spasial dan nonspasial untuk penyusunan materi teknis muatan ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional, materi teknis ruang perairan pada rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah;
- 3) Pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan indikasi arahan pemanfaatan ruang perairan

- pesisir dan pulau-pulau kecil untuk materi teknis muatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) Pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan untuk penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 5) Pelaksanaan dukungan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional dan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 6) Pelaksanaan dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis, dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - 7) Pelaksanaan fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - 8) Pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, laporan tahunan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan perwujudan rencana tata ruang dan rencana zonasi;
 - 9) Pelaksanaan dukungan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut;
 - 10) Pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut;
 - 11) Pelaksanaan fasilitasi pendampingan teknis masyarakat dan kelompok masyarakat serta identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;
 - 12) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - 13) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

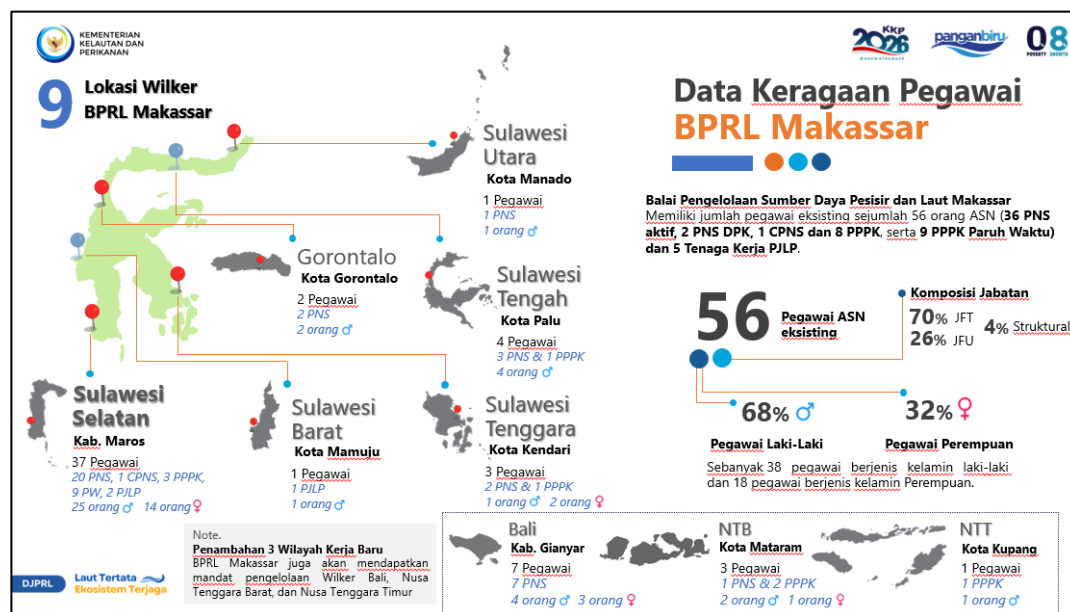
1.4 Organisasi

Secara keorganisasian BPRL Makassar dipimpin oleh Kepala Balai dengan pangkat Eselon IV A yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, dan membawahi Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dengan rincian tugas sebagai berikut berikut:

A. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di Subbagian Tata Usaha adalah Penata Laksana Barang Terampil 1 (satu) orang, Pranata PK APBN Mahir 2 (Dua) orang, dan Analis Pengelola Keuangan APBN Pertama. Pada Subbagian Tata Usaha juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari Perencana Ahli Pertama 1 (satu) orang dan Penelaah Teknis Kebijakan 1 (satu) orang yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program evaluasi, dan laporan. Selebihnya dibantu oleh tim kelompok jabatan fungsional tertentu dalam bidang teknis.

B. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang ada di BPRL Makassar adalah jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut & Pesisir (PELP) dengan jumlah 20 (Dua Puluh), Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) dengan jumlah 5 (Lima) orang, Penata Perizinan dengan jumlah 2 (tiga) orang, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan dengan jumlah 1 (satu) orang, dan fungsional umum dengan jumlah 4 (empat) orang. Kelompok jabatan fungsional tersebut terdiri dari 12 (dua belas) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Pertama, 7 (delapan) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Muda dan 1 (Satu) orang Fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) yang masih berstatus CPNS, 4 (empat) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Pertama, 1 (satu) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Muda, 1 (satu) orang Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, 8 (delapan) orang Penata Layanan Operasional, 1 (satu) orang Pengelola Layanan Operasional dan 8 (delapan) orang Operator Layanan Operasional.

Berikut ini adalah jumlah dan sebaran staf BPRL Makassar tahun 2026:



Gambar 2. Jumlah dan sebaran staf BPRL Makassar Tahun 2026

Selain Pejabat Struktural yang berkantor di Maros, ada juga staf yang ditugaskan di satuan pelayanan BPRL Makassar yang mencakup wilayah seluruh Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Pada Tahun 2026 ini ada 9 (sembilan) daerah yang ditempatkan penanggung jawab Satuan Kerja beserta staf yaitu di Palu, Manado, Kendari, Mamuju, Gorontalo, Bali dan Lombok serta Kupang. Selain staf yang bertempat di Kantor UPT dan wilayah kerja BPRL Makassar, terdapat juga dua staf yang diperbantukan ke instansi lain yaitu ke Mahkamah Agung sebagai Hakim Ad hoc.

Tabel 1. Komposisi jenjang Pendidikan pegawai BPRL Makassar

Pendidikan	Golongan (PNS)							P3K	Jumlah Total
	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c		
SMA/SMK/MA								8	8
D3	1	1						1	3
D4				3				1	4
S1	2	16	1	2				7	21
S2		2	1	4	3	1			11
S3						1	1		2
Jumlah Total	3	19	2	9	3	2	1	17	56

Pada Tahun 2026, jumlah pegawai BPRL Makassar yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang. Komposisi tersebut terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, 2 (dua) orang PNS DPK (Dipekerjakan), 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain ASN, BPRL Makassar juga didukung oleh tenaga non-ASN, yaitu 9 (sembilan) orang PPPK Paruh Waktu dan 5 (lima) orang Tenaga Kerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang membantu pelaksanaan tugas operasional. Adapun distribusi pegawai BPRL Makassar secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 2, sedangkan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.

1.5 Isu Strategi, Potensi dan Permasalahan

BPRL Makassar memiliki potensi wilayah kerja yang mencakup Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, dengan keberagaman karakteristik wilayah yang membuka peluang pemanfaatan ruang laut berbasis potensi daerah. Hal ini dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan ruang laut yang berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui PNBP.

Terdapat isu strategis di wilayah kerja BPRL Makassar meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan tata ruang laut sesuai peraturan, serta penyesuaian tata kerja dan penguatan fungsi penataan ruang laut di UPT berdasarkan Permen KP Nomor 29 Tahun 2025.

Selain potensi dan sumberdaya tentunya banyak permasalahan di daerah pesisir Sulawesi, beberapa permasalahan utama yang ada di BPRL Makassar antara lain:

1. Keberlanjutan sumber daya laut menghadapi tantangan akibat luas wilayah, kompleksitas ekologi, serta tingginya konflik pemanfaatan antar-sektor. Laut sebagai *common pool resources* berpotensi mengalami *tragedy of the commons* tanpa penataan zonasi yang terintegrasi dan berbasis ekosistem. Degradasi lingkungan pesisir dan tumpang tindih pemanfaatan ruang mengancam daya dukung, sehingga diperlukan penataan ruang laut yang adaptif dan berkelanjutan.
2. Perencanaan ruang laut masih terkendala belum lengkapnya dokumen zonasi di berbagai tingkat. Terdapat masalah teknis (kompetensi, kualitas,

anggaran) dan substansi (ketidaksinkronan darat-laut) yang memicu tumpang tindih pemanfaatan ruang. Selain itu, keterbatasan data yang akurat dan mutakhir turut menghambat kepastian perencanaan.

3. Pemanfaatan ruang laut terkendala sarana dan prasarana serta SDM, berdampak pada perizinan, pengawasan, dan layanan. Pemanfaatan KKPRL belum optimal akibat rendahnya kapasitas pelaku usaha, lemahnya monitoring, serta anggapan sebagai formalitas. Masih marak pemanfaatan tanpa izin dan lemahnya penegakan sanksi, memicu konflik dan risiko kerusakan ekosistem, diperparah ketidaksinkronan regulasi.
4. Optimalisasi PNBPD dari pemanfaatan ruang laut belum maksimal akibat sistem perizinan yang belum terintegrasi dan mekanisme penarikan yang masih terbatas (sekali bayar). Hal ini menyulitkan pengawasan, menurunkan akuntabilitas, serta menyebabkan potensi penerimaan negara belum tergali optimal. Diperlukan penguatan sistem perizinan dan PNBPD berbasis keberlanjutan.
5. Pengendalian pemanfaatan ruang laut masih lemah meskipun zonasi telah ditetapkan, ditandai banyaknya kegiatan tidak sesuai izin atau zonasi. Hal ini dipicu lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas sektor antar instansi. Akibatnya, praktik ilegal dan konflik pemanfaatan ruang semakin meningkat. Kondisi ini juga berdampak pada ketidaktertiban ruang laut serta ancaman terhadap ekosistem dan keamanan.
6. Partisipasi publik dalam penataan ruang laut masih terbatas dan cenderung formalitas, dengan minimnya keterlibatan kelompok lokal seperti nelayan dan masyarakat adat. Keterbatasan akses informasi, bahasa teknis, dan mekanisme pengaduan membuat masyarakat kurang terlibat. Akibatnya, dokumen zonasi kurang mencerminkan kondisi lokal dan berpotensi menimbulkan konflik.
7. Sistem data dan informasi spasial kelautan belum memadai karena data tersebar, tidak terintegrasi, dan sering tidak mutakhir. Keterbatasan SDM dan infrastruktur turut menghambat pengelolaan data berbasis bukti. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lemahnya pengendalian, sehingga diperlukan sistem terintegrasi nasional.
8. Pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang laut masih rendah, sehingga berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan berkelanjutan. Kurangnya edukasi, komunikasi, dan transparansi informasi membatasi keterlibatan publik. Diperlukan penguatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat agar ruang laut menjadi sumber kesejahteraan, bukan konflik.
9. Sarana dan prasarana penunjang penataan ruang laut masih terbatas, khususnya infrastruktur TI, perangkat geospasial, dan sarana lapangan. Kondisi ini menghambat digitalisasi, pengolahan data, serta efektivitas pengawasan dan layanan KKPRL. Diperlukan penguatan infrastruktur untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan kinerja pengelolaan ruang laut.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini **bertujuan menginformasikan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2026 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) BPRL Makassar Tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

A. Bab 1 Pendahuluan,

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar seperti visi, misi, tujuan organisasi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

B. Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Pada bab ini uraian singkat tentang rencana kinerja 2026 dan penetapan kinerja Tahun 2026 BPRL Makassar.

C. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini berisi hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

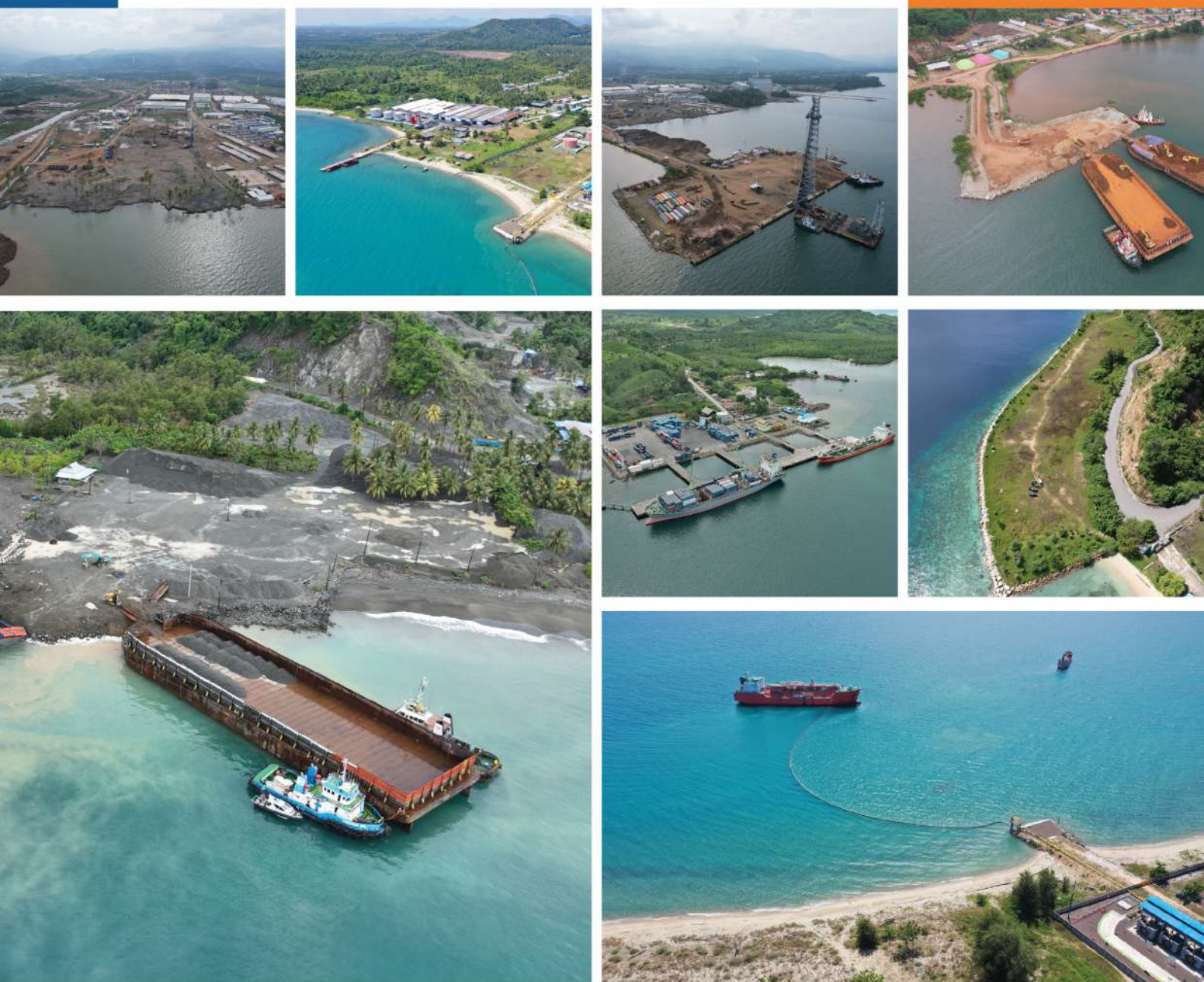
D. Bab 4 Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan saran untuk perencanaan Tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

20 26



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dokumen ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis periode 2025–2029.

RPJMN 2025–2029 memuat visi Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan (Asta Cita) serta delapan prioritas nasional. Prioritas tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional berupa penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Selain itu, RPJMN juga menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagai tindak lanjut RPJMN tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029. Renstra KKP menitikberatkan pada penerapan paradigma ekonomi biru, yaitu pendekatan pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui penguatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Selanjutnya, sebagai penjabaran operasional di tingkat unit eselon I, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang berfokus pada penguatan tata kelola ruang laut melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut. Renstra DJPRL menempatkan penataan ruang laut sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi biru, dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas di ruang laut dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dalam kerangka tersebut, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan penataan ruang laut di wilayah kerja. Peran tersebut meliputi fasilitasi perencanaan ruang laut, pendampingan pemanfaatan ruang laut melalui instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta pembinaan kepada pemangku kepentingan di daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPRL Makassar Tahun 2026 disusun secara berjenjang (cascading) dan selaras dengan sasaran strategis KKP serta DJPRL. IKU tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam aspek penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Indikator kinerja Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026 menunjukkan fokus yang kuat pada penguatan fungsi utama penataan ruang laut, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pembinaan, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari sisi teknis, indikator jumlah kawasan yang difasilitasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi, persentase wilayah yang didampingi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir, serta penyusunan rencana zonasi rinci menunjukkan peran strategis BPRL Makassar dalam memastikan tersedianya dokumen perencanaan ruang laut yang berkualitas dan terintegrasi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mencegah konflik pemanfaatan ruang laut serta mendukung kepastian hukum bagi berbagai kegiatan di wilayah pesisir dan laut.

Selain itu, indikator nilai penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) mencerminkan kualitas layanan perizinan dasar yang menjadi instrumen pengendalian utama dalam pemanfaatan ruang laut. Tingginya target pada indikator ini menunjukkan semakin baiknya tata kelola pemanfaatan ruang laut yang dilakukan secara terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, indikator jumlah lokasi yang telah dilakukan identifikasi pemahaman masyarakat menunjukkan bahwa BPRL Makassar tidak hanya berfokus pada aspek regulasi dan teknis, tetapi juga memperhatikan bidang sosial dalam penataan ruang laut. Peningkatan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karena partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat kepatuhan serta menjaga keberlanjutan pengelolaan ruang laut.

Selanjutnya, indikator pada aspek tata kelola seperti nilai SAKIP, NKPA, IKPA, pemanfaatan hasil pengawasan, SPIP, profesionalitas ASN, keterbukaan informasi publik, inovasi pelayanan, pengawasan kearsipan, serta pengumuman RUP pada SIRUP mencerminkan komitmen BPRL Makassar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Secara keseluruhan, indikator kinerja tersebut telah menunjukkan keseimbangan antara capaian teknis dan penguatan manajemen organisasi, serta selaras dengan arah kebijakan Renstra KKP dan Renstra DJPRL Tahun 2025–2029 dalam mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, indikator kinerja BPRL Makassar Tahun 2026 telah mencerminkan keseimbangan antara capaian teknis penataan ruang laut dan penguatan tata kelola organisasi. Keterpaduan ini menunjukkan bahwa BPRL Makassar tidak hanya berperan dalam menghasilkan output berupa dokumen dan layanan penataan ruang laut, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan kegiatan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, indikator kinerja yang ditetapkan telah selaras dengan arah kebijakan Renstra KKP dan Renstra DJPRL Tahun 2025–2029 serta mendukung implementasi pembangunan kelautan berbasis ekonomi biru yang

berkelanjutan.

Dengan demikian, perencanaan kinerja BPRL Makassar Tahun 2026 telah disusun secara selaras dengan dokumen perencanaan nasional, Renstra KKP, dan Renstra DJPRL, serta mencerminkan keterpaduan antara kebijakan strategis dan implementasi operasional di tingkat unit pelaksana teknis. Keselarasan ini diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan secara efektif, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perencanaan kinerja BPRL Makassar pada Tahun 2026 menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPRL Makassar dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Pada tahun 2026 terdapat total 5 Sasaran Kegiatan dan 16 Indikator Kinerja. Berikut ini adalah perjanjian kinerja BPRL Makassar Tahun 2026:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPRL Makassar Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Makassar	1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)	4
		2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)	80
		3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)	1
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja BPRL Makassar	4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)	75
3.	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar	5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
			sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)	
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)	3
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)	70
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Makassar (Nilai)	71,75
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Makassar (Nilai)	89,5
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%)	81
		11.	Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN BPRL Makassar (Indeks)	81
		13.	Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Makassar (Nilai)	92
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)	1
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)	65
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%)	77

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar merupakan komitmen antara Kepala BPRL Makassar dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja ini terdiri dari **5 sasaran kegiatan** dan **16 indikator kinerja** yang berfokus pada pelaksanaan fungsi utama penataan ruang laut, yaitu fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan rencana zonasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan zonasi rinci, penyelenggaraan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), pengendalian pemanfaatan ruang laut melalui monitoring dan evaluasi, serta peningkatan pemahaman masyarakat. Target kinerja yang ditetapkan antara lain meliputi fasilitasi 4 kawasan perencanaan ruang laut, 80% wilayah pesisir yang difasilitasi, 1 kawasan zonasi rinci, nilai KKPRL sebesar 75, serta 100% pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut.

Selain aspek teknis, Perjanjian Kinerja ini juga mencakup indikator pada aspek tata kelola organisasi yang mendukung penguatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi. Indikator tersebut meliputi nilai SAKIP, NKPA, IKPA, pemanfaatan hasil pengawasan, SPIP, indeks profesionalitas ASN, keterbukaan informasi publik, inovasi pelayanan publik, pengawasan kearsipan, serta transparansi pengadaan barang/jasa melalui SIRUP. Seluruh target kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp5,8 miliar yang terbagi pada kegiatan pemanfaatan ruang laut dan dukungan manajemen internal. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja BPRL Makassar Tahun 2026 mencerminkan keterpaduan antara capaian kinerja teknis dan penguatan tata kelola organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut secara keseluruhan.

2.3 Keselarasan PK Eselon I dan UPT

Perjanjian Kinerja Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) yang disusun berdasarkan arah kebijakan dalam Renstra DJPRL Tahun 2025–2029. Keselarasan ini menunjukkan adanya keterkaitan yang sistematis antara sasaran strategis di tingkat Eselon I dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Seluruh indikator kinerja yang ditetapkan pada BPRL Makassar telah disusun untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program DJPRL, baik pada aspek teknis penataan ruang laut maupun pada aspek tata kelola pemerintahan.

Secara teknis, indikator kinerja BPRL Makassar seperti fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan rencana zonasi, penyusunan zonasi rinci, serta layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya DJPRL dalam mewujudkan tata kelola ruang laut yang terencana dan berkelanjutan. Selain itu, indikator pengendalian melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut serta pembinaan melalui peningkatan pemahaman masyarakat turut mendukung sasaran DJPRL dalam memastikan pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tata kelola pemerintahan, indikator seperti nilai SAKIP, NKPA, IKPA, SPIP, serta indikator reformasi birokrasi lainnya menunjukkan kontribusi BPRL Makassar dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi di lingkup

DJPRL. Dengan demikian, seluruh indikator kinerja BPRL Makassar Tahun 2026 telah selaras secara vertikal (cascading) dengan indikator kinerja DJPRL, sehingga capaian kinerja di tingkat UPT secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di tingkat Eselon I.

2.4 Postur Anggaran 2026

Dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026, BPRL Makassar didukung dengan alokasi anggaran total sebesar **Rp5.800.000.000,- (Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)**. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penataan ruang laut yang mencakup kegiatan Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar **Rp4.800.000.000,-** serta Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar **Rp1.000.000.000,-**.

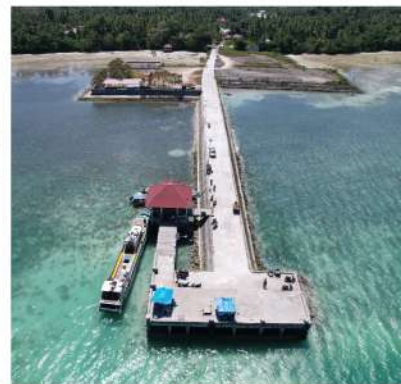
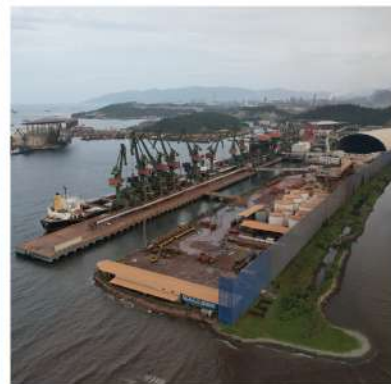
Tabel 3. Postur Anggaran BPRL Makassar Tahun 2026

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.800.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	1.000.000.000
Total Anggaran Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026		5.800.000.000

BAB III

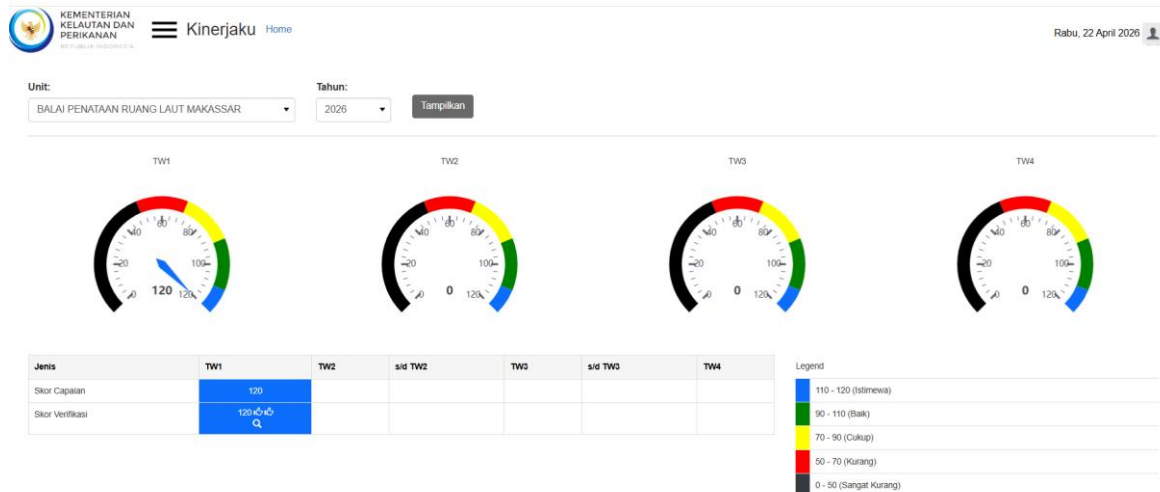
AKUNTABILITAS KINERJA

20 26



III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang terdapat capaian targetnya. Nilai Capaian Kinerja BPRL Makassar Triwulan I Tahun 2026 adalah 120 dengan predikat “Istimewa”.



Gambar 3. Capaian Kinerja BPRL Makassar pada aplikasi Kinerjaku

Untuk detail dan keseluruhan capaian sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja BPRL Makassar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja BPRL Makassar Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN I		
				TARGET	CAPAIAN	% (Kinerjaku)
1	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Makassar	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)	4	-	-
		2.	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di	80	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN I		
				TARGET	CAPAIAN	% (Kinerjaku)
			Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)			
		3.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)	1	-	-
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja BPRL Makassar	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)	75	-	-
3.	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)	100	-	-
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)	3	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN I		
				TARGET	CAPAIAN	% (Kinerjaku)
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)	70	-	-
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Makassar (Nilai)	71,75	-	-
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Makassar (Nilai)	89,5	-	-
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%)	81	100	120
		11.	Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar	3	-	-
		12.	Indeks profesionalitas ASN BPRL Makassar (Indeks)	81	-	-
		13.	Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Makassar (Nilai)	92	-	-
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)	1	-	-
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)	65	-	-
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%)	77	-	-

3.1 Capaian kinerja

3.1.1 IKU 1 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)

Kawasan yang difasilitasi berupa ruang laut nasional, kawasan antar wilayah (KAW), kawasan strategis nasional (KSN), Kawasan strategis nasional tertentu (KSNT),

- 1) Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana berisi arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara secara keseluruhan, yang mencakup 4 matra darat, laut, udara dan bumi. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan tata ruang
- 2) KAW adalah kawasan laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, yang diukur dari garis pantai wilayah laut suatu daerah provinsi, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumberdaya dan penataan ruangnya
- 3) Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi, sumberdaya alam dan/atau lingkungan
- 4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah dilaksanakan pendampingan penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang perairan dan/atau rencana zonasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Adapun Capaian IKU 1 Pada Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU 1 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)

SS -1	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Makassar					
IKU - 1	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	4	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.2 IKU 2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)

Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) merupakan wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir yang menyusun Rencana Tata Ruang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi RTRW Provinsi dan/atau Kab/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota.

Fasilitasi pendampingan penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dilakukan melalui dukungan pengumpulan, verifikasi data tematik spasial dan/atau non spasial.

Fasilitasi dukungan pendampingan dalam rangka sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota terhadap dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menghitung Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$R = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

R : Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir

a : Jumlah dokumen pendampingan yang diproses pada tahun berjalan

b : Jumlah usulan pendampingan yang masuk pada tahun berjalan

catatan: jika tidak terdapat usulan pada tahun berjalan maka capaian dihitung sesuai target

Adapun Capaian IKU 2 Pada Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IKU 2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar

SS -1	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Makassar					
IK - 2	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwiulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran BPRL Makassar masih melekat pada DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.3 IKU 3 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)

Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil adalah wilayah perairan pesisir dan perairan lainnya yang memiliki potensi sumber daya alam, sosial, lingkungan yang dapat dimanfaatkan secara optimal melalui Perencanaan.

Rencana Zonasi Rinci yang selanjutnya disingkat RZR adalah rencana detail tata ruang laut sebagai rencana rinci dari RZ KAW, RTR KSN, dan RTR Wilayah Provinsi. Dukungan pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil yang dilakukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah melalui dukungan pengumpulan, verifikasi, dan/atau permodelan data tematik spasial dan non spasial dan/atau profil kawasan.

Profil Kawasan adalah bagian dari dokumen rencana zonasi rinci yang menggambarkan secara komprehensif mengenai kondisi potensi, karakteristik, dan arah pengembangan suatu kawasan pesisir dan/atau perairan lainnya yang akan dikembangkan atau dimanfaatkan untuk investasi dan pengelolaan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil.

Adapun Capaian IKU 3 Pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaat ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di BPRL Makassar (Kawasan)

SS -1	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Makassar					
IK - 3	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di BPRL Makassar (Kawasan)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran BPRL Makassar masih melekat pada DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.4 IKU 4 Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut peran Unit Pelaksana Teknis yaitu pelaksanaan dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut serta pelaksanaan fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Layanan penyelenggaraan KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT meliputi:

- 1) Asistensi dan pendampingan permohonan KKPRL
- 2) Penilaian teknis yang dilaksanakan UPT
- 3) Verifikasi lapang penilaian teknis
- 4) Pengumpulan data investasi dan tenaga kerja
- 5) Sosialisasi ke Pelaku Usaha.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.

Kriteria penilaian teknis yang dilaksanakan UPT meliputi:

- 1) Bersifat non strategis nasional
- 2) Tidak menggunakan cara reklamasi
- 3) Dalam 1 (satu) wilayah kerja unit pelaksana teknis
- 4) Luas permohonan kurang dari atau sama dengan 10 hektare
- 5) Bidang perikanan atau pariwisata
- 6) Dilakukan oleh perseorangan, pemerintah pusat/daerah atau pelaku usaha dalam rangka tanggung jawab sosial

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan *output* penyelenggaraan KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT, meliputi: asistensi dan pendampingan permohonan KKPRL (Berita Acara), penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan (Berita Acara), verifikasi lapang penilaian teknis KKPRL (Berita Acara) serta laporan investasi dan tenaga kerja dan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan oleh UPT (Laporan). Adapun formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penyelenggaraan} = ((BA_A \times n) + (L\ I\&L \times n) + (BA_P \times n) + (BA_V \times n) + (Ls \times n)) \times 100$$

Keterangan:

- BA_A : Jumlah berita acara asistensi dan/atau pendampingan permohonan KKPRL yang dilaksanakan UPT
- BA_P : Jumlah berita acara penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan UPT per penugasan
- BA_V : Jumlah berita acara verifikasi lapang penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan UPT
- $LI\&L$: Jumlah laporan Investasi dan tenaga kerja yang dihasilkan
- Ls : Jumlah Sosialisasi KKPRL yang dilaksanakan UPT

n = bobot nilai, dimana:

$$\begin{aligned} BA_A \times n, \text{ nilai } n &= 0,1 \\ L\ I\&L \times n, \text{ nilai } n &= 0,25 \\ BA_P \times n, \text{ nilai } n &= 0,3 \\ BA_V \times n, \text{ nilai } n &= 0,1 \\ Ls \times n, \text{ nilai } n &= 0,25 \end{aligned}$$

Penentuan bobot nilai didasarkan pada pengaruh terhadap layanan, frekuensi pelaksanaan kegiatan, proporsi anggaran dan tingkat intervensi masing-masing kegiatan.

Jumlah maksimal yang dapat diklaim adalah sebagai berikut:

- BA asistensi dan/atau pendampingan = 12
- BA penilaian teknis = 36
- BA verifikasi lapangan = 12
- Laporan Investasi = 2
- Jumlah Sosialisasi = 2

Capaian IKU 4 pada Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)

SS -2	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja BPRL Makassar					
IK - 4	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	75	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwiulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

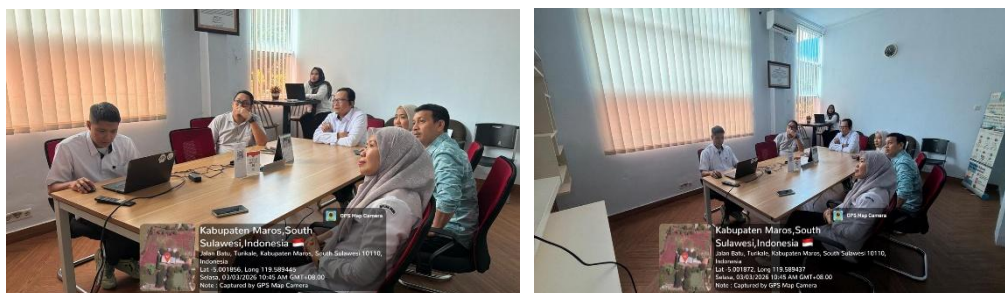
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator kinerja diantaranya:

- 1) Telah dilakukan Kegiatan verifikasi lapangan permohonan PKKPRIL PT. Lunyuk Aquatama Nusantara yang melibatkan tim BPRL Makassar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, dan PT. Lunyuk Aquatama Nusantara sebagai pemrakarsa pada tanggal 10 Maret 2024.
- 2) Tim Pelayanan KPRL BPRL Makassar menerima Audiensi dari Pemohon (Muhammad Syamsul Rezza Nurdin) pada tanggal 19 Februari 2026 untuk asistensi terkait kelengkapan dokumen permohonan KKPRL yang akan diajukan oleh Pemohon. Kegiatan konsultasi dilaksanakan di Ruang Diskusi Bokori yang berada di Kantor BPRL Makassar.



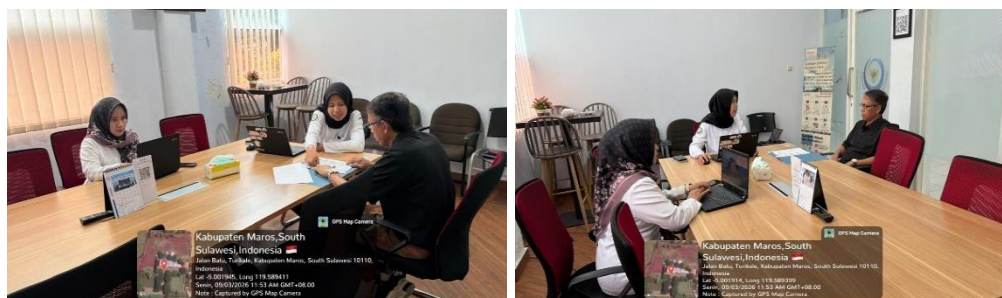
Gambar 4. Konsultasi KKPRL atas nama Muhammad Syamsul Rezza Nurdin

- 3) Tim Pelayanan KKPRL BPRL Makassar bersama Kepala BPRL Makassar menerima audiensi dari Pemerintah Daerah melalui DKP Sulawesi Selatan (CDK Mamminasata) pada tanggal 3 Maret 2026. Audiensi tersebut bertujuan untuk mendapatkan asistensi terkait kesesuaian lokasi serta penjelasan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan dokumen pengajuan KKPRL, sehubungan dengan rencana pembangunan dermaga di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.



Gambar 5. Konsultasi KKPRL CDK Mamminasata

- 4) Tim Pelayanan KKPRL BPRL Makassar menerima audiensi dari PT. Marina Indo Prima pada tanggal 9 Maret 2026. Sebelumnya, PT. Marina Indo Prima telah memiliki KKPRL untuk kegiatan penampungan air dengan KBLI 36002. Dalam audiensi tersebut, perusahaan menyampaikan rencana pengembangan usaha berupa penambahan kegiatan pembesaran crustacea dengan KBLI 03254. Sehubungan dengan rencana tersebut, perusahaan berencana mengajukan KKPRL dengan skema multi-KBLI guna mendukung integrasi kegiatan usaha. Kegiatan konsultasi dilaksanakan di Ruang Diskusi Bokori, Kantor BPRL Makassar, sebagai bagian dari upaya pendampingan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pemohon.



Gambar 6. Konsultasi KKPRL PT. Marina Indo Prima

3. Pada triwulan I tahun 2026, BPRL Makassar telah melaksanakan penilaian teknis sebanyak 120 kali terhadap 104 subjek hukum, yang terdiri atas 94

persetujuan KKPRL dan 26 konfirmasi KKPRL. Berdasarkan kewenangan pelaksanaan penilaian teknis, UPT melaksanakan 62 penilaian (51,7%) terhadap 48 subjek hukum, sedangkan kewenangan pusat melaksanakan 58 penilaian (48,3%) terhadap 56 subjek hukum. Ditinjau dari jenis kegiatan, penilaian teknis didominasi oleh sektor perikanan (37,5%) dan terminal khusus (28,3%), yang secara kumulatif mencerminkan tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan produktif dan logistik. Selanjutnya, kontribusi kegiatan lainnya meliputi pariwisata (9,2%), breakwater/konstruksi pelindung pantai (7,5%), bangunan di atas laut (5,8%), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut (5%), ruas jalan (2,5%), pipa/kabel laut (1,7%), rehabilitasi ekosistem (0,8%), serta kegiatan lainnya (1,7%). Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kinerja pelaksanaan penilaian teknis yang optimal.



Gambar 7. Dashboard KKPRL BRPL Makassar

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini Adalah pelaksanaan penilaian teknis dilakukan secara daring dan pelaksanaan asisten PPKPRL dilakukan di kantor BPRL Makassar sehingga kegiatan ini tidak memerlukan anggaran.

3.1.5 IKU 5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)

Monitoring Kepatuhan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut atas izin KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT, dengan indikator pembentuk:

- 1) Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- 2) Penilaian Laporan Tahunan KKPRL
- 3) Perwujudan RTR/RZ

4) Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting

5) Dukungan data untuk proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut

Dalam hal pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan KKPR, Penilaian Laporan Tahunan KKPR, Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut dan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting dilakukan pada tahapan pengumpulan data. Kriteria pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Penilaian Laporan Tahunan KKPR yang dilakukan oleh UPT meliputi:

- 1) Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha
- 2) Kegiatan Berusaha masuk kriteria Resiko Rendah s.d Menengah
- 3) Non Reklamasi
- 4) Non Proyek Strategis Nasional (PSN)
- 5) Izin KKPR yang diterbitkan di Wilayah Kerja BPRL/LPRL

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menggunakan rumus berikut.

$$\sum n = \frac{\%V + \%W + \%X + \%Y + \%Z}{\text{Jumlah Indikator Pembentuk}}$$

Keterangan:

$\sum n$: Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ yang dilaksanakan oleh UPT

$\%V$: Persentase Data Penilaian Pelaksanaan KKPR

$\%W$: Persentase Data Hasil Penilaian Laporan Tahunan KKPR

$\%X$: Persentase Jumlah Dokumen RTR/RZ yang dikumpulkan data IPU-nya

$\%Y$: Persentase Jumlah Provinsi yang telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting di tahun berjalan

$\%Z$: Persentase dukungan data untuk proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut

Capaian IKU 5 pada Tahun 2026 disajikan sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian IKU 5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)

SS -5	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar					
IK - 5	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran BPRL Makassar masih melekat pada DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu.

- 1) Persiapan petugas penilai laporan tahunan berupa pengusulan nama petugas ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut untuk penilaian laporan tahunan sesuai dengan surat Kepala BPRL Makassar Nomor B.48/BPSPL.3/PRL.210/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal Personil Tim Penilai Laporan Tahunan UPT, dalam surat tersebut disampaikan nama-nama personil tim penilai Laporan Tahunan di Balai Penataan Ruang Laut Makassar yang di tugaskan.
- 2) Persiapan pelaksanaan penilaian KKPRL 2026 sesuai dengan surat Kepala BPRL Makassar Nomor B.107/BPSPL.3/PRL.210/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 perihal Usulan Lokasi Penilaian Pelaksanaan KKPRL Tahun 2026. Dalam surat tersebut disampaikan usulan Lokasi Penilaian Pelaksanaan KKPRL Tahun 2026 pada wilayah kerja Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.6 IKU 6 Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)

Lokasi adalah kabupaten/kota pesisir yang telah dilaksanakan identifikasi pemahaman masyarakat penyelenggaraan penataan ruang laut. Pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang laut adalah pengetahuan masyarakat terkait penyelenggaraan penataan ruang laut. Identifikasi Pemahaman Masyarakat dilakukan melalui survei dan *focus group discussion* pemahaman penataan ruang laut kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 1) Kriteria pemahaman masyarakat meliputi
 - a. Paham: 71-100

- b. Kurang Paham: 31-70
 - c. Tidak Paham: 0-30.
- 2) Parameter kriteria pemahaman:
- a. Paham
 - Mengetahui apa yang dimaksud penyelenggaraan penataan ruang laut dan mengetahui proses, manfaat, dan implementasinya.
 - Mengetahui bahwa Pemanfaatan ruang laut wajib memiliki ijin pemanfaatan.
 - b. Kurang Paham
 - Mengetahui apa yang dimaksud penyelenggaraan penataan ruang laut tetapi belum mengetahui proses, manfaat dan implementasi penyelenggaraan penataan ruang laut.
 - c. Tidak Paham
 - Belum mengetahui apa yang dimaksud penyelenggaraan penataan ruang laut.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan lokasi (kabupaten/kota yang memiliki pesisir) yang telah dilaksanakan identifikasi pemahaman masyarakat penyelenggaraan penataan ruang laut.

Tabel 10. Capaian IKU 6 Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)

SS -4	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar					
IK - 6	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	3	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwiulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan

dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.7 IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Level II di lingkungan Ditjen PRL. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PRL, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretaris Ditjen PRL.

Kategori nilai PM SAKIP Unit Level II yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 11. Capaian IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)

SS -5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	70	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.8 IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Makassar

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25)	1. Nilai Efektivitas Satker	10
	2. Nilai Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker CRO	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO	:	Capaian RO
PenggunaanSBK	:	Penggunaan SBK
NEAlokasi	:	Nilai Efektivitas Alokasi
WCRO	:	Bobot Capaian RO
WpenggunaanSBK	:	Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi	:	Bobot Efisiensi Alokasi

Tabel 12. Capaian IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPRL Makassar (Nilai)

SS -5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Makassar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	71,75	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwiulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.9 IK 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Makassar (%)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Indikator kinerja ini dinilai dengan cara berikut.

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 13. Capaian IK 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

SS -5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Makassar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	89,5	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwiulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.10 IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Balai Penataan Ruang Laut Makassar sampai dengan waktu pengukuran.

Data capaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan dirilis melalui surat dari Sekretaris Ditjen PRL.

Indikator ini dihitung dengan formula berikut.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti BPSPL Makassar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
2. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Tabel 14. Capaian IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%)

SS - 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	81	100	120%	-	81	123%

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Realisasi Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar pada triwulan I ini yaitu 100 dengan persentase capaian 123% atau 120% pada aplikasi kinerja dengan target triwulan I sebesar 81.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar triwulan I dibandingkan dengan Target pada Perjanjian Kinerja tahun 2026 sebesar 123% dengan target tahunan sebesar 81.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres Capaian indikator kinerja Persentase Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPRL Makassar Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 752/DJPRL.1/TU.140/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2026. Realisasi capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit kerja Lingkup BPRL Makassar sampai dengan 31 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026). Sampai dengan triwulan I 2026 BPRL Makassar belum terdapat pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP sehingga tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPRL Makassar.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.11 IK 11 Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP triwulanan adalah laporan yang disusun pada periode triwulan I tahun 2026 sampai dengan triwulan III tahun 2026.

Indikator kinerja ini dihitung dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen PRL.

Tabel 15. Capaian IK 11 Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 11	Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	3	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target pada triwulan I karena frekuensi pengukuran capaiannya dimulai pada triwulan II sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target pada triwulan I karena frekuensi pengukuran capaiannya dimulai pada triwulan II sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.12 IK 12 Indeks profesionalitas ASN BPRL Makassar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 berikut.

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 16. Capaian IK 12 Indeks profesionalitas ASN BPRL Makassar (Indeks)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 12	Indeks profesionalitas ASN BPRL Makassar (indeks)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	81	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwiulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.13 IK 13 Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Makassar (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- 1) Mengumumkan informasi publik

- 2) Menyediakan informasi publik
- 3) Sarana dan Prasarana
- 4) Kelembagaan
- 5) Digitalisasi

Indikator kinerja ini dihitung dengan.

- 1) Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
- 2) SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
- 3) Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
- 4) Hasil capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80% dan presentasi uji publik sebanyak 20%. Jika presentasi uji publik tidak diselenggarakan oleh BHKLN, maka capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik hanya berdasarkan hasil penilaian SAQ.
- 5) Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9
5	Tidak Informatif	< 39,9

Tabel 17. Capaian IK 13 Nilai Keterbukaan informasi publik BPRL Makassar

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 13	Nilai keterbukaan informasi public BPRL Makassar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	92	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.14 IK 14 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Indikator ini dihitung dengan Jumlah proposal Inovasi pelayanan Publik yang ditetapkan dalam berita acara penilaian oleh Tim Penilai Inovasi pelayanan Publik Ditjen PRL.

Tabel 18. Capaian IK 14 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 14	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.15 IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur Tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit pelaksana teknis diperoleh dari nilai pengawasan kearsipan internal unit pengolah/unit pelaksana teknis.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan

internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis
 - a) penciptaan arsip
 - b) penggunaan arsip
 - c) pemeliharaan arsip
 - d) penyusutan arsip.
- 2) Sumber daya kearsipan
 - a) sumber daya manusia kearsipan
 - b) prasarana dan sarana.

Tabel 19. Capaian IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	65	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwiulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.1.16 IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan

pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 20. Capaian IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar					
IK - 16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW 1 Tahun 2025	Target TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 2026	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK	% Capaian Thdp Target PK
-	-	-	-	-	77	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Trwiulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena BPRL Makassar merupakan Satuan Kerja yang baru didirikan pada 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan dikarenakan anggaran pada BPRL Makassar masih melekat di DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan triwulan I 2026 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan kegiatan ini belum berjalan dan target dilakukan secara tahunan.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026, BPRL Makassar didukung dengan alokasi anggaran total sebesar **Rp5.800.000.000,- (Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)** yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPRL Makassar. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penataan ruang laut yang mencakup kegiatan Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar **Rp4.800.000.000,-** serta Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar **Rp1.000.000.000,-**.

Tabel 1. Postur Anggaran BPRL Makassar Tahun 2026

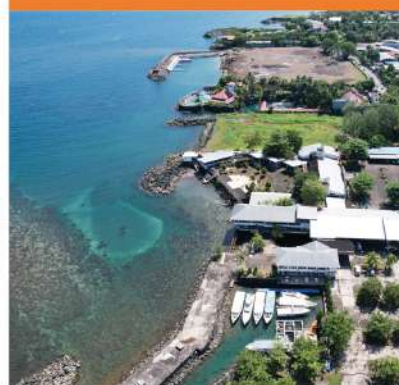
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.800.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	1.000.000.000
Total Anggaran Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026		5.800.000.000

Pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat realisasi karena anggaran BPRL Makassar masih melekat pada DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

BAB IV

PENUTUP

20
26



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPRL Makassar Triwulan I Tahun 2026 adalah kategori **Istimewa** dengan nilai kinerja organisasi **120%**. Pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat realisasi karena anggaran BPRL Makassar masih melekat pada DIPA eselon 1 (satu) dan belum memiliki DIPA tersendiri.

Capaian Indikator Kinerja Manajerial pada Triwulan I Tahun 2026 adalah realisasi Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar pada triwulan I ini yaitu 100 dengan persentase capaian 123% atau 120% pada aplikasi kinerjajaku dengan target triwulan I sebesar 81.

Di balik capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang memperoleh predikat “Istimewa”, BPRL Makassar menghadapi tantangan strategis berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 dengan wilayah kerja dari 9 (sembilan) provinsi yang mencakup Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, yang memiliki karakteristik biofisik, sosial, dan tata ruang yang beragam. Selain itu, jumlah SDM ASN sebanyak 60 (Empat puluh) orang, sehingga berdampak pada beban kerja dan perlunya penguatan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi BPRL Makassar hingga Triwulan I Tahun 2026 masih belum memiliki DIPA tersendiri dan masih menginduk pada Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berdampak pada terbatasnya fleksibilitas dan kemandirian dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam hal penganggaran, penyerapan anggaran, dan pengambilan keputusan operasional. Kegiatan berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kurang optimalnya pencapaian target kinerja, serta terbatasnya respons terhadap kebutuhan lapangan yang bersifat mendesak. Selain itu, koordinasi administrasi dan birokrasi yang lebih panjang juga dapat mengurangi efisiensi pengelolaan sumber daya serta menghambat percepatan implementasi kebijakan penataan ruang laut di wilayah kerja BPRL Makassar.

Sebagai upaya perbaikan ke depan dengan luas wilayah kerja BPRL Makassar perlu memperkuat sistem digital spasial terintegrasi yang menghubungkan data zonasi, konservasi, dan perizinan secara real-time guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Penguatan kapasitas SDM juga perlu dilakukan melalui pelatihan teknis, antara lain di bidang GIS, AMDAL, pengoperasian drone, dan pemodelan hidro-oseanografi. Selain itu, diperlukan penambahan petugas untuk mendukung optimalisasi pelayanan perizinan KKPRL agar tetap efektif dan tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Eselon I Ditjen PRL serta percepatan penyusunan DIPA mandiri bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis.

4.2 Rekomendasi

Terdapat rekomendasi untuk mendukung kinerja pada Tahun 2026, maka direkomendasikan adanya pelaksanaan penyusunan Tim Kerja sebagai bagian dari

proses *cascading* atau penyusunan MPH dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai upaya percepatan penyusunan DIPA BPRL Makassar tahun 2026.

4.3 Tindak Lanjut

Tidak terdapat tindak lanjut yang harus dilakukan dikarenakan BPRL Makassar merupakan Unit Kerja baru sesuai dengan Permen KP Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) MAKASSAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Muhammad Ishak Yusma**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Penataan Ruang Laut Makassar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Penataan Ruang Laut
Makassar

A. Muhammad Ishak Yusma

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.800.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	1.000.000.000
Total Anggaran Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026		5.800.000.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Penataan Ruang Laut
Makassar



A. Muhammad Ishak Yusma



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) MAKASSAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Muhammad Ishak Yusma**

Jabatan : Kepala Balai Penataan Ruang Laut Makassar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Penataan Ruang Laut
Makassar

A. Muhammad Ishak Yusma

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Makassar	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)	4
		2.	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)	80
		3.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)	1
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja BPRL Makassar	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)	75
3.	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan nya sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)	100
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)	70
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Makassar (Nilai)	71,75
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Makassar (Nilai)	89,5
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%)	81
		11.	Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN BPRL Makassar (Indeks)	81
		13.	Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Makassar (Nilai)	92
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)	1
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)	65
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%)	77

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.800.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	1.000.000.000
Total Anggaran Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026		5.800.000.000

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Penataan Ruang Laut
Makassar



A. Muhammad Ishak Yusma

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

NOTA DINAS
NOMOR 752/DJPRL.1/TU.140/IV/2026

Yth. : 1. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Para Kepala UPT lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
3. Ketua Tim Kerja Program, Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 14 April 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor: 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 tanggal 13 April 2026 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2026, bersama ini disampaikan capaian IKU Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PRL sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit kerja Lingkup Ditjen PRL sampai dengan 31 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026);
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan I Tahun 2026 lingkup Ditjen PRL sebesar 100% yaitu sebanyak 2 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 2 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada unit kerja terkait.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana

Tembusan:
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Lampiran

Nomor : 752/DJPRL.1/TU.140/IV/2026

Tanggal : 14 April 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PKRL	0	0	100	0	0	100
2	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	0	0	100	0	0	100
3	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	0	0	100	0	0	100
4	Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	0	0	100	0	0	100
5	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	0	0	100	0	0	100
6.	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	0	0	100	0	0	100
7.	Balai Penataan Ruang Laut Padang	0	0	100	0	0	100
8.	Balai Penataan Ruang Laut Makassar	0	0	100	0	0	100
9.	Loka Penataan Ruang Laut Serang	0	0	100	0	0	100
10.	Loka Penataan Ruang Laut Sorong	2	2	100	0	0	100
Jumlah		0	2	100	0	0	100



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal KKP
2. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
3. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 13 April 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan I Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (Triwulan I Tahun 2026).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan I Tahun 2026 lingkup KKP sebesar 92,78% (tuntas 604 dari 651 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
4. Para Kepala Badan lingkup KKP
5. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Lampiran
 Nomor : 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026
 Tanggal : 13 April 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP” Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	39	39	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	103	88	85,44%	15	14,56%
3	Ditjen PRL	2	2	100,00%	0	0,00%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	84	63	75,00%	21	25,00%
5	Ditjen PSDKP	73	73	100,00%	0	0,00%
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	118	115	97,46%	3	2,54%
7	BPPSDMKP	49	49	100,00%	0	0,00%
8	Ditjen PDSPKP	28	25	89,29%	3	10,71%
9	BPPMHKP	150	145	96,67%	5	3,33%
10	Itjen	5	5	100%	0	0,00%
TOTAL		651	604	92,78%	47	7,22%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada Unit Kerja:

*Balai Penataan Ruang Laut
Makassar*

Atas Nilai Capaian Kinerja Organisasi dengan **Predikat
Istimewa (120)** Triwulan I Tahun 2026

Jakarta, 21 April 2026



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



LAPORAN KINERJA 2026

Laut Tertata 
Ekosistem Terjaga